

# PENGARUH TENAGA KERJA BERIJAZAH SMA, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN AKSES PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2014-2023

Rezza Novitalia Saputri<sup>1</sup>, Mardhiyah Hayati<sup>2</sup>,  
Taufiqurrahman<sup>3</sup>

Program Studi Ekonomi Syariah<sup>1</sup>,  
Program Studi Ekonomi Syariah<sup>2</sup>,  
Program Studi Ekonomi Syariah<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam<sup>1,2,3</sup>  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung<sup>1,2,3</sup>

rezzanovitalia180@gmail.com<sup>1</sup>,  
mardhiyahhayati.kampus@gmail.com<sup>2</sup>,  
Taufiqur@radenintan.ac.id<sup>3</sup>

**Received:** May 10, 2025. **Revised:** June 8, 2025. **Accepted:** June 12, 2025 . **Issue Period:** Vol.9 No.3 (2025), Pp.1038-1050

**Abstrak:** Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia sangat penting untuk mengukur sejauh mana kesetaraan gender tercapai dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan memantau IPG, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan gender dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tenaga Kerja Berijazah SMA, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Akses Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Gender Di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam periode 2014-2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Causal study dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang berasal dari data sekunder data panel yang di dapatkan dianalisa menggunakan analisa regresi linier berganda melalui Software SPSS Versi 26. Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa variabel Tenaga Kerja Berijazah SMA dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak mempengaruhi indeks Pembangunan Gender di Indonesia, dengan nilai sig >0,05, sedangkan Akses Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia dengan nilai Sig 0,000. Adapun nilai Adjust R-Square sebesar 0,420 menunjukkan bahwa variabel Tenaga Kerja Berijazah SMA, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Akses Pendidikan hanya memberikan pengaruh sebesar 42% dan sisanya 58% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

**Kata kunci:** Tenaga Kerja Berijazah SMA, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Akses Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Gender

**Abstract:** The Gender Development Index (GDI) in Indonesia is very important to measure the extent to which gender equality is achieved in various sectors, such as education, health, and economy. By monitoring the GDI, the government can design



DOI: 10.52362/jisamar.v9i3.1909

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

*more effective policies to reduce gender inequality and improve the welfare of society as a whole. This study aimed to determine the effect of High School Graduated Workers, Government Expenditure in the Education Sector and Access to Education on the Gender Development Index in Indonesia in the Perspective of Islamic Economics for the period 2014-2023. This study used a Causal study type of research with a qualitative approach, data sources derived from secondary data, panel data obtained are analyzed using multiple linear regression analysis through SPSS Software Version 26. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the variables of High School Graduated Workers and Government Expenditure in the Education Sector do not affect the Gender Development Index in Indonesia, with a sig value > 0.05, while Access to Education affects the Gender Development Index in Indonesia with a Sig value of 0.000. The Adjusted R-Square value of 0.420 indicates that the variables of High School Graduated Workers, Government Expenditure in the Education Sector and Access to Education only have an influence of 42% and the remaining 58% is influenced by other variables that were not examined.*

**Keywords:** *High School Graduated Workers, Government Expenditure in the Education Sector and Access to Education on the Gender Development Index*

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan negara [1]. Konsep pendidikan di Indonesia berfokus pada pencapaian pemerataan dan kualitas yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pendidikan nasional Indonesia mengadopsi kurikulum yang bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Namun, meskipun ada upaya yang signifikan, tantangan dalam mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas masih sangat besar. Hal ini terlihat dari ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta perbedaan kualitas antara sekolah negeri dan swasta [2]. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan menjadi faktor krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Setiap tahunnya, alokasi anggaran untuk pendidikan terus meningkat, namun masih jauh dari cukup untuk mengatasi masalah besar yang ada. Pengeluaran sektor pendidikan, meskipun sudah lebih dari 20% dari total APBN, sering kali tidak cukup untuk mencakup seluruh kebutuhan pembangunan pendidikan yang menyeluruh, seperti peningkatan infrastruktur, pelatihan tenaga pengajar, dan distribusi pendidikan ke seluruh pelosok negeri. Kekurangan anggaran ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas pendidikan di beberapa daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi akses dan kesetaraan pendidikan [3].

Akses pendidikan di Indonesia menjadi masalah utama yang perlu segera diatasi. Meskipun secara umum, angka partisipasi pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan, terutama di tingkat dasar dan menengah, masih banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Akses yang terbatas, baik dalam hal fisik maupun finansial, seringkali menjadi hambatan utama, terutama bagi keluarga yang tinggal di daerah terpencil atau dalam kondisi ekonomi yang lemah. Hal ini mengarah pada ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan dan menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin lebar, di mana sebagian besar anak-anak di daerah terbelakang tidak dapat menikmati pendidikan dengan baik [4].

Perkembangan tenaga kerja berijazah SMA di Indonesia menunjukkan pentingnya pendidikan menengah dalam mempersiapkan generasi muda untuk memasuki dunia kerja. Meskipun jumlah lulusan SMA terus meningkat, tantangan utama adalah kualitas dari pendidikan tersebut. Banyak lulusan SMA yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya relevansi antara kurikulum yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan dunia industri. Oleh karena itu, peningkatan kualitas



DOI: 10.52362/jisamar.v9i3.1909

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

pendidikan menengah, terutama dalam hal keterampilan vokasional dan pengembangan *soft skills*, sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Salah satu indikator yang mencerminkan kesetaraan dalam pembangunan sosial adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur kesenjangan gender dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan politik. Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam mengurangi kesenjangan gender dalam sektor pendidikan, tantangan masih ada, terutama dalam hal akses dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, penting untuk terus memperhatikan kesetaraan gender dalam perencanaan pendidikan dan kebijakan pemerintah, agar pembangunan yang inklusif dapat terwujud.



**Gambar 1.** Indeks Pembangunan Gender di Indonesia tahun 2014-2023

Sumber: *Badan Pusat Statistik*, (2024)

Berdasarkan data dari indeks pembangunan gender di Indonesia tahun 2014-2023 menunjukan bahwa data pada tahun 2019 sebesar 91,14 dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 90,67. Hal ini terjadi karena masih adanya kemajuan ini belum sepenuhnya merata. Meskipun IPG secara nasional menunjukkan tren positif, ketimpangan masih ada, terutama di beberapa daerah terpencil yang memiliki tradisi budaya yang konservatif. Meskipun pencapaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Indonesia konsisten mengalami tren positif, Indeks Pembangunan Gender Indonesia di skala global pada 2022 berada di peringkat 112 dengan skor 0,940. Angka tersebut bahkan di bawah rerata global. Laporan tersebut juga memperlihatkan bahwa Indeks pembangunan perempuan Indonesia lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, Indeks Pembangunan Gender Indonesia juga terpuruk di peringkat keenam di antara negara-negara ASEAN. Diperparah dengan indeks ketimpangan gender Indonesia yang berada di peringkat ke-109 dari 170 negara dengan skor 0,439. Dilansir oleh RRI 2023 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengungkap, 9,68 persen perempuan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki, yaitu 9,40 persen. Kemiskinan sering dikaitkan dengan perempuan. Sebab, pada masyarakat miskin, perempuan menunjukkan indikator kesejahteraan yang lebih rendah. Sehingga hal ini menjadi urgensi dalam penelitian. Peneliti tertarik untuk mengkaji faktor faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan gender di Indonesia, khususnya dalam prespektif Islam. Pada penelitian ini faktor yang dikaji yaitu tenaga kerja berijazah SMA, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan akses pendidikan.



DOI: 10.52362/jisamar.v9i3.1909

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Ketidaksetaraan dalam pembagian pekerjaan domestik, serta pembatasan peran perempuan dalam beberapa lapisan masyarakat, masih menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan gender secara penuh. Meskipun demikian, secara keseluruhan, peningkatan IPG menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia kini lebih memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam mengakses pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor penyebab rendahnya indeks pembangunan gender di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk stereotip sosial, ketidaksetaraan dalam pembagian pekerjaan domestik, serta kurangnya akses bagi perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pekerjaan yang setara [5]. Faktor lainnya yang bisa mempengaruhi pembangunan gender di Indonesia adalah angkatan kerja berijazah SMA serta akses Pendidikan yang setara [6].

Angkatan kerja lulusan SMA adalah kelompok besar dalam struktur pasar kerja Indonesia, memberikan kontribusi signifikan di sektor formal dan informal, lulusan SMA sering kali menghadapi keterbatasan akses ke pekerjaan berkualitas karena rendahnya keterampilan teknis, dampak digitalisasi, dan ketidakpastian ekonomi, dengan mengembangkan potensi angkatan kerja berijazah SMA kita dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang berijazah SMA memegang peran strategis dalam struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan posisi sebagai kelompok pendidikan menengah, mereka menjadi penghubung antara tenaga kerja berpendidikan rendah (SD/SMP) dan tenaga kerja dengan pendidikan tinggi (diploma atau sarjana). Tenaga kerja berijazah SMA merupakan elemen penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka berada di posisi strategis untuk mendukung pembangunan nasional, tetapi memerlukan dukungan dalam bentuk pelatihan keterampilan, kebijakan yang mendukung, dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai [7].

Akses Pendidikan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang krusial, terutama terjadi bagi beberapa wilayah tertinggal, menurut [8] dalam penelitiannya menemukan bahwa permasalahan rendahnya kualitas Pendidikan di Indonesia diakibatkan karena kurangnya pemerataan dan kesempatan akses Pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Ketimpangan aksesibilitas Pendidikan pada daerah tertinggal seperti Papua, NTB, NTT dan berbagai wilayah timur lainnya menjadikan pembangunan gender di Indonesia masih terus di upayakan [9]. Berdasarkan tinjauan dan permasalahan tersebut, perlu adanya penelitian yang lebih spesifik guna mengetahui **“Pengaruh Tenaga Kerja Berijazah SMA, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Akses Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2014-2023”**

## II. METODE DAN MATERI

### Indeks pembangunan gender

Gender didefinisikan sebagai perbedaan dalam peran antara laki-laki dan perempuan, yang mencakup fungsi, aktivitas, perilaku, serta tanggung jawab. Perbedaan peran ini melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, perbedaan tersebut seringkali menimbulkan persepsi bahwa perempuan seharusnya lebih fokus pada urusan rumah tangga, sementara laki-laki diharapkan untuk bekerja guna mendapatkan penghasilan. Pandangan ini mendorong ketimpangan gender di suatu wilayah, yang pada akhirnya menyebabkan pencapaian perempuan dalam bidang pembangunan tertinggal dibandingkan laki-laki [10].

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. IPG bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana kesetaraan gender tercapai dalam suatu negara atau wilayah, serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki. Indeks ini sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan yang mengedepankan kesetaraan gender. Pengukuran IPG umumnya dilakukan dengan menghitung dua komponen utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk laki-laki dan perempuan. IPM sendiri mencakup dimensi kesehatan (harapan hidup), pendidikan (harapan lama sekolah



dan rata-rata lama sekolah), serta pendapatan per kapita. IPG mengukur perbedaan dalam hasil pembangunan antara kedua gender dengan menggunakan rasio atau perbandingan antara IPM laki-laki dan perempuan. Semakin kecil nilai perbedaan antara kedua gender, maka semakin tinggi tingkat kesetaraan gender di negara atau wilayah tersebut [11].

### Tenaga kerja Berijazah SMA

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 20031 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja [12]. Menurut Mashuri dalam [13] indikator tenaga kerja adalah : a. Ketersediaan tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang diperlukan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dalam jumlah yang optimal. Ketersediaan ini terkait dengan kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, tingkat upah dan sebagainya. b. Kualitas tenaga kerja. Skill menjadi pertimbangan yang tidak boleh diremehkan, dimana spesialisasi sangat dibutuhkan pada pekerjaan tertentu dan jumlah yang terbatas, apabila dalam kualitas tenaga kerja tidak diperhatikan tidak menutup kemungkinan adanya kemancatan produksi. c. Jenis kelamin. Jenis kelamin akan menentukan jenis pekerjaan. Pekerjaan laki-laki akan mempunyai fungsi yang cukup berbeda dengan pekerjaan perempuan seperti halnya pengangkutan, pengepakan, dan sebagainya. d. Upah tenaga kerja perempuan dan laki-laki yang berbeda. Perbedaan ini juga dibedakan oleh tingkat golongan, pendidikan, jenis pekerjaan dan lain sebagainya

### Pengeluaran pemerintah

Menurut [14] pengeluaran pemerintah adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai aktivitas dan kebijakan publik. Pengeluaran ini mencakup berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, keamanan, serta program-program sosial. Pengeluaran pemerintah bisa dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional. Pengeluaran ini biasanya dibagi menjadi dua kategori utama: pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin meliputi biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari, seperti gaji pegawai negeri, biaya administrasi, dan pemeliharaan fasilitas publik. Sementara itu, pengeluaran pembangunan digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, investasi dalam sektor-sektor produktif, dan program-program yang mendukung kemajuan sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah berperan penting dalam mengatur perekonomian negara dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien untuk kepentingan masyarakat [15].

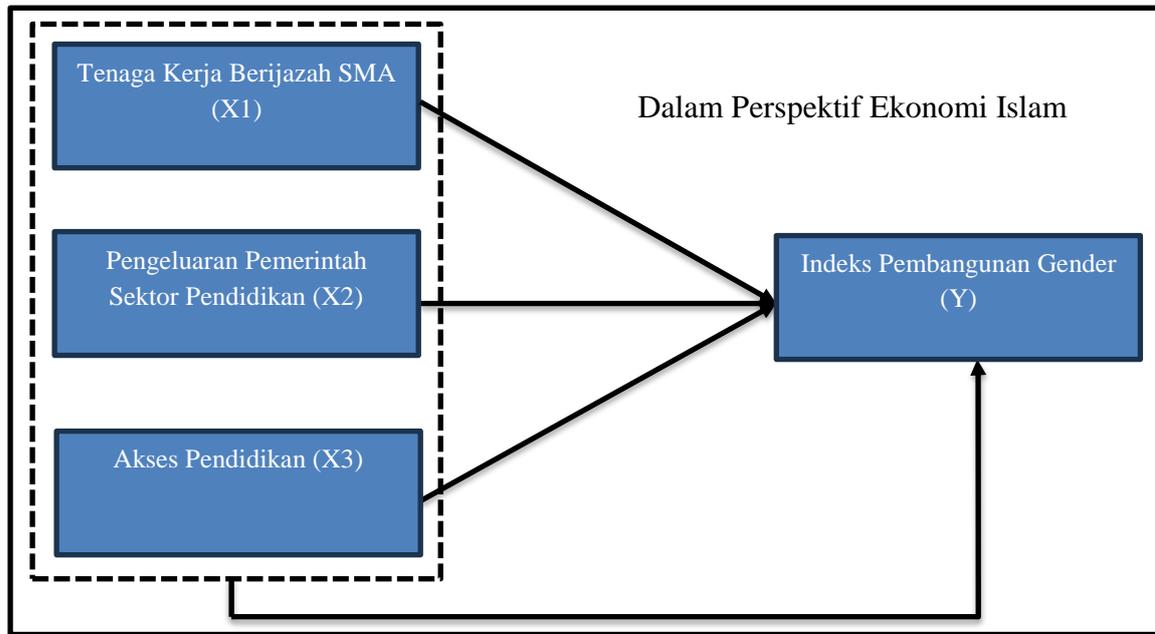
### Akses Pendidikan

Akses pendidikan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam mengikuti proses pendidikan, tanpa ada hambatan berupa faktor ekonomi, sosial, geografis, atau diskriminasi lainnya. Akses pendidikan mencakup aspek ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan, kualitas pengajaran, serta kesempatan untuk mengakses informasi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam belajar. Semakin baik akses pendidikan, semakin besar peluang bagi individu untuk mengembangkan potensi



diri, meningkatkan keterampilan, dan memperbaiki kualitas hidup mereka, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif [9].

### Kerangka Teoritik



Gambar 2. Kerangka Teoritik

### METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian causal study dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang dikumpulkan dari berbagai sumber, terutama dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai tenaga kerja berijazah SMA, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, akses pendidikan, serta Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada 9 (sembilan) provinsi di Indonesia selama periode 2014–2023. Pemilihan provinsi didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data serta relevansi dengan variabel penelitian. Untuk menganalisis hubungan antara variabel, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, yang memungkinkan pengujian hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS27. Tahapan dalam analisis data meliputi:

1. Uji Statistik Deskriptif – untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian.
2. Uji Asumsi Klasik
  - a. Uji Normalitas: Menguji apakah data residual berdistribusi normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau grafik P-P Plot.
  - b. Uji Multikolinearitas: Memeriksa apakah terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel independen dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance.
  - c. Uji Heteroskedastisitas: Menguji apakah varians residual konstan atau tidak menggunakan uji Glejser atau scatterplot.
  - d. Uji Autokorelasi: Menggunakan uji Durbin-Watson untuk mendeteksi adanya korelasi residual dalam model regresi.



3. Uji Regresi Linier Berganda  
Menjalankan regresi dengan memasukkan variabel independen dan dependen. Menginterpretasikan koefisien regresi untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
4. Uji Hipotesis
  - a. Uji t ( Parsial): Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.
  - b. Uji F ( Simultan): Untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ): Mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

### III. PEMBAHASAN DAN HASIL

Analisis untuk mendapatkan faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dalam perangkat lunak SPSS. Proses analisis diawali dengan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data. Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas guna memastikan model regresi memenuhi asumsi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Setelah itu, dilakukan estimasi regresi linier berganda untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap IPG. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk menguji pengaruh parsial setiap variabel independen, uji F untuk menguji pengaruh simultan, serta analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabilitas IPG.

#### 3.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data dalam suatu penelitian sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Uji ini membantu dalam memahami karakteristik dataset dengan menyajikan informasi mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Statistika Deskriptif Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GDI	10	90	92	90.51	.709
Tenaga Kerja Berpendidikan SMA	10	18906194	26587392	22529664.00	2554941.544
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	10	131314	230728	160327.27	27743.425
Akses Pendidikan	10	0	67	55.02	19.910
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27, 2025.

Berdasarkan Tabel 1. Descriptive Statistics memberikan gambaran mengenai distribusi data yang digunakan dalam penelitian. Jumlah sampel untuk setiap variabel adalah 10 observasi. Nilai minimum dan maksimum menunjukkan rentang data, di mana Indeks Pembangunan Gender (GDI) berkisar antara 90 hingga 92, sementara variabel Akses Pendidikan memiliki rentang yang lebih luas, yaitu dari 0 hingga 67. Rata-rata dari setiap variabel menggambarkan nilai tengah yang diperoleh dalam sampel, seperti rata-rata GDI sebesar 90,51 dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan sebesar 160.327,27. Selain itu, nilai Standard Deviation (Simpangan Baku) menunjukkan sebaran data di sekitar rata-rata, di mana variabel Tenaga Kerja Berpendidikan SMA memiliki variasi yang cukup besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Data ini digunakan sebagai dasar untuk memahami karakteristik dataset sebelum melakukan analisis lebih lanjut, seperti regresi linier berganda, guna menguji hubungan antar variabel dalam penelitian ini.



DOI: 10.52362/jisamar.v9i3.1909

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### 3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan tahap penting dalam analisis regresi linier berganda untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi asumsi Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Uji ini bertujuan untuk menghindari bias dalam estimasi parameter regresi sehingga hasil analisis lebih valid dan dapat diinterpretasikan dengan baik.

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian ini membandingkan distribusi data sampel dengan distribusi normal teoretis. Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal, sedangkan jika Sig. < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 2. Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.25563043
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.131
	Negative	-.126
Test Statistic		.131
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

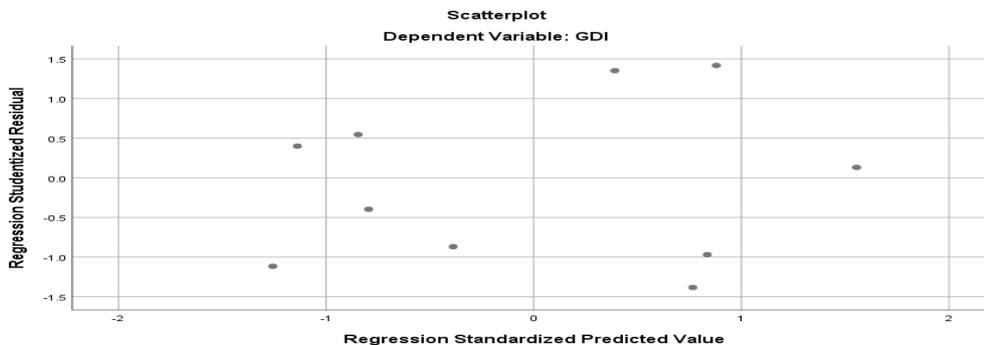
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27, 2025.

Berdasarkan Tabel 2, Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.200 pada uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Ini berarti tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol ( $H_0$ ), yang menyatakan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi dianggap terpenuhi, dan analisis regresi dapat dilanjutkan tanpa perlu transformasi data atau metode koreksi lainnya.

#### 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dengan uji plot (Scatterplot) bertujuan untuk melihat apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan. Pengujian dilakukan dengan melihat pola penyebaran titik-titik pada grafik Scatterplot antara residual (SRESID) dan prediksi variabel dependen (ZPRED). Jika titik-titik tersebar secara acak tanpa pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, yang berarti asumsi regresi terpenuhi.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Sumber : Data diolah dengan SPSS 27, 2025.



DOI: 10.52362/jisamar.v9i3.1909

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa titik-titik yang tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti pola garis tersebut, maka data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam regresi terpenuhi.

### 3. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini uji Multikolinieritas dideteksi dengan menganalisis metrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai tolerance dan VIF.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	84.449	1.084		77.920	.000		
	Tenaga Kerja Berpendidikan SMA	2.866E-7	.000	1.034	3.320	.016	.224	4.468
	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	-1.425E-6	.000	-.056	-.208	.842	.301	3.320
	Akses Pendidikan	-.003	.007	-.085	-.427	.684	.544	1.837

a. Dependent Variable: GDI

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27, 2025.

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa keseluruhan model penelitian terbebas dari masalah Multikolinieritas, temuan ini dibuktikan dengan koefisien VIF yang seluruhnya < 10.

### 3.3 Pengujian Linear Berganda

Pengujian ini dilakukan dengan uji F atau serentak dan uji individu atau uji t pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia

#### 1. Uji Regresi Linear Berganda

Uji Regresi Linear Berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model ini membantu menentukan hubungan kausal dan kekuatan pengaruh setiap variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	84.449	1.084		77.920	.000
	Tenaga Kerja Berpendidikan SMA	2.866E-7	.000	1.034	3.320	.016
	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	-1.425E-6	.000	-.056	-.208	.842
	Akses Pendidikan	-.003	.007	-.085	-.427	.684

a. Dependent Variable: GDI

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27, 2025.

Berdasarkan Tabel 4, hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa konstanta (Intercept) sebesar 84.449, yang berarti jika semua variabel independen bernilai nol, maka Indeks Pembangunan Gender (IPG) diprediksi sebesar 84.449. Variabel Tenaga Kerja Berpendidikan SMA memiliki koefisien 2.866E-7, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit tenaga kerja berpendidikan SMA akan meningkatkan IPG sebesar 0.0000002866, dengan asumsi variabel lain tetap. Sementara itu, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan memiliki koefisien negatif -1.425E-6, yang berarti



peningkatan pengeluaran ini justru sedikit menurunkan IPG, meskipun dampaknya sangat kecil. Selain itu, Akses Pendidikan memiliki koefisien -0.003, menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan satu unit justru berpotensi menurunkan IPG sebesar 0.003, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas pendidikan atau ketimpangan akses. Interpretasi lebih lanjut diperlukan dengan melihat signifikansi statistik dan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model.

2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menggambarkan variasi variabel independen

Tabel 5. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	84.449	1.084		77.920	.000
	Tenaga Kerja Berpendidikan SMA	2.866E-7	.000	1.034	3.320	.016
	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	-1.425E-6	.000	-.056	-.208	.842
	Akses Pendidikan	-.003	.007	-.085	-.427	.684

a. Dependent Variable: GDI

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27, 2025.

- Hasil uji regresi menunjukkan bahwa Tenaga Kerja Berpendidikan SMA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai t hitung 3.320, dan signifikan 0.016. Karena p-value < 0.05 serta nilai t hitung bernilai positif, dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan jumlah tenaga kerja berpendidikan SMA akan meningkatkan IPG secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja berpendidikan SMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG).
- Sementara itu, variabel Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan memiliki nilai t hitung - 0.208, dan signifikan 0.842, karena p-value > 0.05 serta nilai t hitung negatif. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPG dalam model ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh alokasi dana yang belum merata atau faktor lain seperti efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang belum optimal dalam meningkatkan indeks pembangunan gender.
- Variabel Akses Pendidikan juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPG, dengan nilai t hitung sebesar -0.427, dan signifikan sebesar 0.684. Karena p-value > 0.05 serta nilai t hitung negatif. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG). Peningkatan akses pendidikan dalam model ini belum cukup berkontribusi terhadap peningkatan IPG. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kualitas pendidikan, ketimpangan akses, atau kurangnya keterkaitan antara akses pendidikan dengan kesetaraan gender dalam pembangunan.

3. Uji F

Uji statistik Simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji F

Model		ANOVA <sup>a</sup>				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.930	3	1.310	13.363	.005 <sup>b</sup>
	Residual	.588	6	.098		
	Total	4.518	9			

a. Dependent Variable: GDI

b. Predictors: (Constant), Akses Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Tenaga Kerja Berpendidikan SMA



Sumber : Data diolah dengan SPSS 27, 2025.

Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan variabel Indeks Pembangunan Gender (GDI). Dengan nilai F-hitung sebesar 13.363 dan Sig. = 0.005, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (Akses Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Tenaga Kerja Berpendidikan SMA) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GDI. Meskipun dalam uji t terdapat beberapa variabel yang tidak berpengaruh signifikan secara individual, hasil uji F ini menunjukkan bahwa kombinasi dari ketiga variabel tersebut tetap berkontribusi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada GDI.

#### 4. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menggambarkan variasi variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.933 <sup>a</sup>	.870	.805	.313

a. Predictors: (Constant), Akses Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Tenaga Kerja Berpendidikan SMA

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27, 2025.

Hasil Model Summary menunjukkan bahwa model regresi memiliki ketepatan tinggi dalam menjelaskan Indeks Pembangunan Gender (GDI), dengan R = 0.933 yang menunjukkan hubungan kuat. Nilai R Square = 0.870 berarti 87% variasi GDI dapat dijelaskan oleh Akses Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Tenaga Kerja Berpendidikan SMA, sementara Adjusted R Square = 0.805 tetap menunjukkan model yang baik setelah penyesuaian. Dengan Standard Error of the Estimate (SEE) = 0.313, model ini cukup akurat dalam memprediksi GDI.

#### 3.4 Pembahasan

Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk memberdayakan individu, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tenaga kerja berijazah SMA yang semakin meningkat berpotensi menciptakan peluang kerja yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan gender di pasar kerja. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang lebih besar juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, yang mengutamakan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, khususnya bagi perempuan. Akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi perempuan, akan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan potensi dan mengurangi ketimpangan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi dan politik. Secara keseluruhan, upaya peningkatan pendidikan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan dapat mendorong tercapainya kesetaraan gender dan meningkatkan Indeks Pembangunan Gender di Indonesia dalam kerangka ekonomi yang adil dan inklusif, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa tenaga kerja berijazah SMA mempengaruhi indeks gender di Indonesia, karena beberapa faktor, seperti ketimpangan kualitas pendidikan dan akses yang masih terbatas, terutama untuk perempuan di daerah-daerah tertentu [9]. Meskipun jumlah tenaga kerja berijazah SMA meningkat, kesenjangan dalam kesempatan kerja yang setara, terutama bagi perempuan, tetap ada akibat diskriminasi dan peran sosial yang membatasi partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi. Selain itu, faktor budaya dan struktural, seperti tanggung jawab rumah tangga, juga membatasi kontribusi perempuan di dunia kerja. Oleh karena itu, meskipun jumlah tenaga kerja berijazah SMA bertambah, hal tersebut belum cukup signifikan untuk mengurangi ketimpangan gender secara langsung dalam pembangunan [6]. hal ini serupa dengan variabel pengeluaran pemerintah (X<sub>2</sub>) yang mana dari hasil analisa ditemukan bahwa pengeluaran



DOI: 10.52362/jisamar.v9i3.1909

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

pemerintah tidak mempengaruhi indeks kesetaraan gender di Indonesia, hal ini disebabkan oleh anggaran pendidikan meningkat, alokasi dana yang ada mungkin belum sepenuhnya merata dan fokus pada program yang dapat secara langsung meningkatkan kesetaraan gender [16]. Banyak program pendidikan yang belum sepenuhnya menjangkau perempuan di daerah-daerah terpencil atau marginal, serta masih adanya hambatan budaya dan sosial yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja. Selain itu, pengeluaran pemerintah yang lebih banyak diarahkan untuk infrastruktur atau sektor lain yang tidak langsung terkait dengan pemberdayaan perempuan bisa membuat dampak positif terhadap IPG menjadi terbatas. Tanpa adanya kebijakan yang lebih spesifik untuk mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan dan pekerjaan, pengeluaran pemerintah mungkin belum cukup untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender di Indonesia [17].

Akses Pendidikan menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi indeks kesetaraan gender di Indonesia pada periode tahun 2014-2024, Hal ini karena, pendidikan adalah kunci utama dalam pemberdayaan perempuan dan pengurangan kesenjangan gender. Semakin baik akses pendidikan, semakin besar peluang bagi perempuan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dapat membuka pintu kesempatan kerja yang setara dengan laki-laki. Di banyak daerah di Indonesia, terutama di daerah terpencil, keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan sering menjadi hambatan utama untuk mencapai kesetaraan gender. Dengan meningkatkan akses pendidikan, terutama untuk perempuan, dapat mengurangi ketimpangan dalam partisipasi ekonomi, sosial, dan politik, sehingga mendukung tercapainya kesetaraan gender dalam pembangunan. Pendidikan juga memberikan perempuan lebih banyak kontrol atas hidup mereka, meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan, dan berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih inklusif.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, akses pendidikan merupakan sarana penting untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan gender, yang merupakan nilai dasar dalam ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan bagi semua umat, tanpa memandang jenis kelamin, karena pendidikan dianggap sebagai hak setiap individu untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat [18]. Meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan tidak hanya sejalan dengan prinsip keadilan (*adl*) dalam Islam, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan gender. Pendidikan yang merata akan memungkinkan perempuan untuk mengakses peluang yang setara dengan laki-laki, meningkatkan peran mereka dalam pembangunan ekonomi, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat [19].

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi, penelitian ini menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki ketepatan tinggi dalam menjelaskan Indeks Pembangunan Gender (GDI), dengan R Square sebesar 87%, yang berarti sebagian besar variasi dalam GDI dapat dijelaskan oleh variabel Akses Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Tenaga Kerja Berpendidikan SMA. Uji F menunjukkan bahwa model secara simultan signifikan dalam mempengaruhi GDI ( $p$ -value = 0.005), meskipun uji t mengindikasikan bahwa hanya variabel Tenaga Kerja Berpendidikan SMA yang berpengaruh signifikan secara individual ( $p$ -value = 0.016). Sementara itu, variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Akses Pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan secara individual terhadap GDI. Dengan demikian, peningkatan tenaga kerja berpendidikan SMA menjadi faktor utama dalam meningkatkan GDI, sementara efektivitas pengeluaran pemerintah dan akses pendidikan memerlukan evaluasi lebih lanjut agar dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan gender.

#### REFERENSI

- [1] Kidi, "Teknologi Dan Aktivitas Dalam Kehidupan Manusia," *Jurnal Pendidikan*, vol. 28, pp. 1–28, 2018.



DOI: 10.52362/jisamar.v9i3.1909

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- [2] F. Abdillah, “Konsep Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara Dan Tantangannya Di Era Milennial,” *EDUCARE: Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*, vol. 3, pp. 41–49, 2024.
- [3] M. T. Fi. Putera and M. L. Rhussary, “Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah 3T,” *Jurnal Ekonomi Manajemen*, vol. 12, no. 2, pp. 144–149, 2019.
- [4] A. D. Handoyo and Zulkarnaen, “Faktor-faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional*, vol. 1, no. 1, pp. 21–24, 2019.
- [5] F. Y. Bria, “Faktor Penyebab Kesenjangan Gender Pada Perempuan Dalam Mendapatkan Pendidikan Di Kabupaten Malaka,” *Prosiding Ilmu Pendidikan dan Keguruan*, vol. 1, no. November, pp. 19–29, 2023.
- [6] R. Pahlevi and R. A. A. Rahim, “Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, vol. 3, no. 2, pp. 259–268, 2023, doi: 10.15575/jis.v3i2.26766.
- [7] F. Ria Silvida, R. Anggriawan, M. Indra Gunawan, and M. Dzul Fadlli, “Analisis Angkatan Kerja Indonesia berdasarkan Tingkat Pendidikan,” *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, vol. 1, no. 1, pp. 30–43, 2022.
- [8] E. Suncaka, “Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, vol. 02, no. 03, pp. 36–49, 2023.
- [9] E. Setiawan, N. Handayani, R. Setiyono, Hermansyah, Ahmad, and Widyatmike, “Pemerataan Akses Pendidikan,” *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 4, 2024.
- [10] S. Aprilianti and Y. Setiadi, “Faktor-faktor Yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2020,” *Seminar Nasional Official Statistics*, vol. 2022, no. 1, pp. 245–254, 2022, doi: 10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1351.
- [11] N. S. Wisnujati, “Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender Dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, vol. 20, no. 2, pp. 67–81, 2020, doi: 10.30742/jisa20220201224.
- [12] S. Suhandi, W. Wiguna, and I. Quraysin, “Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia,” *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, vol. 1, no. 1, pp. 268–283, 2021, doi: 10.46306/v1s.v1i1.28.
- [13] A. Priyono, “ANALISIS PENGARUH PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN UPAH MINIMUM PEKERJA TERHADAP JUMLAH KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009-2015,” *Ekonomi dan Bisnis*, vol. 3, no. 2, pp. 91–102, 2018.
- [14] Wahyudi, “Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia,” *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, vol. 3, pp. 103–113, 2020.
- [15] D. A. Anantika and H. Sasana, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Negara Apec,” *Diponegoro Journal Of Economics*, vol. 9, no. 3, pp. 167–178, 2020.
- [16] F. Pratama and E. Dalilah, “Permasalahan dan Rumusan Perbaikan Pengelolaan Dana Penelitian di Indonesia,” *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, vol. 6, no. 1, pp. 109–124, 2020.
- [17] K. A. A. Savitri, M. A. Dewantara, N. L. P. A. Darmayanti, K. Y. K. Dewi, and N. K. C. P. Sari, “Analisis Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Ketidaktepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, vol. 9, no. 1, pp. 59–71, 2019, doi: 10.23887/jinah.v9i1.19939.
- [18] H. Mohammad, Hendra & Nurul, “Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 4, no. 1, pp. 1–14, 2023.
- [19] T. Anggoro, “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam,” *Afkaruna*, vol. 15, no. 1, pp. 129–135, 2019, doi: 10.18196/aaijjs.2019.0098.129-134.

